

**MANAJEMEN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA SIDOREJO KECAMATAN JATISRONO
KABUPATEN WONOGIRI**

MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS FOR THE WELFARE OF THE
PEOPLE IN SIDOREJO VILLAGE JATISRONO SUB DISTRICT WONOGIRI
REGENCY

**Annisa Wahyu Utami¹, Dr. Joko Pramono, S.Sos., M.Si², Dra. Sri Riris
Sugiyarti, M.Si³**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Annisawahyu462@gmail.com, masjepe69@gmail.com, ririss68@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Jatisono Kabupaten Wonogiri. Manajemen dana desa di Desa Sidorejo selalu digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik seperti rabat jalan, talud jalan, pembuatan saluran air dan irigasi, perbaikan rumah tidak layak huni, pipanisasi air bersih, pembuatan jambanisasi, dan pembuatan jalan usaha tani. Manajemen yang baik menjadi tolak ukur organisasi untuk mencapai tujuan dalam melakukan program kegiatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sidorejo. Manajemen yang baik menurut George R. Terry yang terdiri dari 4 indikator yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen dana desa di Desa Sidorejo Kecamatan Jatisono Kabupaten Wonogiri sudah cukup baik. Dalam indikator perencanaan hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa yang telah melaksanakan penetapan tujuan yang cukup jelas dengan melihat kemampuan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Dalam indikator pengorganisasian hal ini dapat dibuktikan dengan pemerintah desa yang melibatkan semua sumber daya manusia yang dimiliki, merumuskan dan menetapkan tugas dengan teliti serta membagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam indikator penggerakan hal ini dapat dibuktikan dengan upaya pemerintah desa untuk selalu memberikan arahan dan motivasi kepada berbagai pihak untuk melakukan kerja cerdas dan kerjasama. Dalam indikator pengawasan hal ini dapat dibuktikan dengan pemerintah desa yang melakukan evaluasi dengan melibatkan semua pihak dan membantu memberikan solusi pada masalah yang terjadi.

Kata kunci : manajemen, kesejahteraan, dana desa

ABSTRACT

This study aims to describe the management of village funds for community welfare in Sidorejo Village, Jatisrono Sub District, Wonogiri Regency. Village fund management in Sidorejo Village has always been used for physical development activities such as concrete road, road batter, construction of water and irrigation canals, repair of uninhabitable houses, piping of clean water, construction of latrines, and construction of farming roads. Good management is an organizational benchmark for achieving goals in carrying out community welfare activity programs in Sidorejo Village. According to George R. Terry, good management consists of 4 indicators, namely planning, organizing, actuating, and controlling. This study used a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques employed interviews, documentation, and observation. The data analysis techniques used were data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that village fund management in Sidorejo Village, Jatisrono Sub-district, Wonogiri Regency is quite good. In the planning indicators, this is evidenced by the village government having carried out clear goal setting by looking at the capabilities and quality of the resources it has. In terms of organizational indicators, this can be proven by the village government involving all human resources, formulating and setting tasks carefully and dividing tasks according to their respective fields. In the mobilization indicator, this can be proven by the village government's efforts to always provide direction and motivation to various parties to do smart work and collaboration. In the monitoring indicator, this can be proven by the village government conducting an evaluation involving all parties and helping to provide solutions to problems that occur.

Keywords: Management, Welfare, Village Funds

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa bertujuan untuk memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan komitmen

pemerintah dalam memandirikan desa, maka pada tahun 2014 diselenggarakan program yang bernama Alokasi Dana Desa. Alokasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian peraturan tersebut di perbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi kehidupan sosial,

material, dan spiritual yang diliputi rasa aman dan ketentraman lahir batin. Oleh karena itu, hal ini memungkinkan setiap warga negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perumusan program harus dilaksanakan secara terstruktur oleh pemerintah dan lembaga swasta yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat sehingga kualitas hidup individu, masyarakat, dan kelompok dapat meningkat.

Masyarakat adalah sekelompok penduduk yang ada di desa, kota, suku atau bangsa yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, yakni untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan dimana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik melalui program pemerintah maupun melalui usaha yang dilakukan masyarakat. Program kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat memiliki taraf kehidupan yang

lebih baik. Pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai program kerja yang dimonitori oleh pemerintah daerah setempat.

Kesejahteraan masyarakat harus disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, untuk merumuskan program harus dilakukan analisa kebutuhan masyarakat. Analisa kebutuhan masyarakat merupakan langkah awal untuk menentukan gambaran yang akan digunakan dalam program kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan agar perencanaan program kesejahteraan masyarakat selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Program kesejahteraan masyarakat sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan), partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), dan berkelanjutan. Didalam penelitian terdahulu Andreas (2019:9), mengungkapkan pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dan manajemen sumber daya yang dimiliki. Yang perlu diutamakan adalah taat akan peraturan yang mengatur tentang rutinitas kegiatan manajemen keuangan desa yang termasuk juga dana desa. Selain itu perlu juga kewajiban untuk

disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program kesejahteraan masyarakat desa yaitu melalui bantuan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk desa di berikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Program kesejahteraan masyarakat yang dilakukan di Desa Sidorejo selalu monoton setiap tahunnya misal rabat jalan, talud jalan, dan sebagainya sedangkan potensi masyarakat di aspek lain memiliki peluang untuk di tingkatan contohnya di bidang pertanian dan industri rumahan kacang mete. Namun pemerintah desa belum memberikan perhatian lebih kepada masyarakat mengenai potensi tersebut.

Melalui permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai program untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mengambil riset dengan

mengambil judul
**“MANAJEMEN DANA DESA
UNTUK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA
SIDOREJO KECAMATAN
JATISRONO KABUPATEN
WONOGIRI”.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana manajemen dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan manajemen dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Dalam hal mengatur, akan ada masalah, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan dari pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisis, menetapkan tujuan, serta menentukan tugas dan tanggung jawab.

Berkaitan dengan pengertian manajemen, menurut Malayu S.P. Hasibuan (2016:2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.

Mondy & Premeaux (1995:15) mengemukakan manajemen adalah proses kerjasama individu dan kelompok serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Sebagai perbandingan lebih lanjut, berikut ini pendapat para ahli mengenai definisi manajemen. Menurut Clayton Reeser (1973:16) manajemen adalah pemanfaatan penggunaan sumber daya fisik dan manusia melalui upaya terkoordinasi dan diselesaikan dengan mengerjakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan.

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Terry (1975:14) manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan guna mencapai tujuan yang sudah diputuskan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Proses perencanaan dan penggerakan sumber daya

manusia dan sumber daya lainnya yaitu material, uang, metode dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi.

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari semua definisi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan koperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya.
- 2) Manajemen mempunyai tujuan tertentu, berhasil tidaknya tujuan itu tergantung pada kemampuan menggunakan segala potensi yang ada.
- 3) Dalam manajemen, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat dominan.
- 4) Manajemen didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur.

b. Fungsi Manajemen

Menurut Henry Fayol (Winardi, 1990:26), fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*commanding*), Pengkoordinasian (*coordinating*), Pengawasan (*controlling*). Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2004:26) fungsi-fungsi

manajemen meliputi
Perencanaan (*planning*),
Pengorganisasian
(*organizing*), Penggerakan
(*motivating*), Pengawasan
(*controlling*), Penilaian
(*evaluation*).

Menurut George R. Terry
(1978:26) dalam buku Dasar-
Dasar Manajemen, proses
dan fungsi manajemen
terbagi menjadi :

- 1) Perencanaan (*Planning*)
Perencanaan adalah
pemilih fakta dan
penghubungan fakta
serta pembuatan dan
penggunaan perkiraan
atau asumsi untuk masa
yang akan datang
dengan menggambarkan
dan merumuskan
kegiatan yang
diperlukan untuk
mencapai hasil yang
diinginkan.
- 2) Pengorganisasian
(*Organizing*)
Pengorganisasian
adalah penentuan,
pengelompokkan, dan
penyusunan macam-
macam kegiatan yang
diperlukan untuk
mencapai tujuan,
penempatan SDM
dalam kegiatan yang
dilakukan, penyediaan
faktor-faktor fisik yang
cocok bagi keperluan

kerja dan penunjukkan
hubungan wewenang
yang dilimpahkan
kepada setiap orang
dalam hubungannya
dengan pelaksanaan
setiap kegiatan.

- 3) Penggerakan
(*Actuating*)
Penggerakan adalah
membangkitkan dan
mendorong seluruh
anggota kelompok agar
berusaha keras untuk
mencapai tujuan dengan
ikhlas serta serasi
dengan perencanaan dan
usaha usaha
pengorganisasian dari
pihak pimpinan.
- 4) Pengawasan
(*Controlling*)
Pengawasan dapat
dirumuskan sebagai
proses penentuan apa
yang harus dicapai, apa
yang sedang dilakukan,
menilai pelaksanaan,
dan apabila perlu
melakukan perbaikan
sehingga pelaksanaan
sesuai dengan rencana.

Menurut Dalton E.M.C
Farland (1974:27) dalam
buku Dasar-Dasar
Manajemen, fungsi
manajemen terbagi menjadi:

- 1) Perencanaan (*Planning*)
- 2) Pengorganisasian
(*Organizing*)

3) Pengawasan
(*Controlling*)

Menurut H. Koontz dan O'Donnel (1972:41) dalam buku Dasar-Dasar Manajemen, proses dan fungsi manajemen terbagi menjadi:

- 1) Perencanaan (*Planning*)
- 2) Pengorganisasian
(*Organizing*)
- 3) Pengarahan (*Directing*)
- 4) Pengawasan
(*Controlling*)

2. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial dan keamanan dan keselamatan hidup. Kesejahteraan telah termasuk kemakmuran hidup, yaitu keadaan yang menunjukkan keadaan orang hidup aman dan tenteram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Soetomo (2014:47) Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang meliputi unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan, ketenteraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata dan mempunyai makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi.

Konsep sejahtera menurut BKKBN (1999:20), dirumuskan lebih luas daripada sekedar definisi kemakmuran ataupun kebahagiaan. Konsep sejahtera tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik orang ataupun keluarga sebagai entitas, tetapi juga kebutuhan psikologisnya. Ada tiga kelompok kebutuhan yang harus terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar, sosial, dan kebutuhan pengembangan.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan masyarakat sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga

Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Alokasi Dana Desa mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara intensif dan efektif. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual.

Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar

kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

3. Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan tahun 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan untuk desa dalam rangka melakukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui dana APBD Kabupaten/Kota. Sementara itu, Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (dalam Arzat Lamber, Lisbeth Lesawengen, Evelin Kawung 2002:3) mengemukakan bahwa dalam manajemen keuangan desa ada

kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Berdasarkan teori fungsi manajemen dari G.R Terry (1975:26), maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Planning (perencanaan) dapat dikaji dengan indikator :
 - a. Merumuskan dan menetapkan tujuan yang jelas
 - b. Analisa kemampuan sumber daya yang dimiliki
 - c. Menetapkan standar keberhasilan pencapaian tujuan
 - d. Adanya batas waktu yang jelas dalam keberhasilan mencapai tujuan
2. Organizing (pengorganisasian) dapat dikaji dengan indikator :
 - a. Alokasi sumber daya
 - b. Merumuskan dan menetapkan tugas
 - c. Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan bidang masing - masing
3. Actuating (penggerakan) dapat dikaji dengan indikator :
 - a. Memberikan motivasi dan instruksi yang jelas kepada pihak - pihak yang terlibat untuk melakukan kerja cerdas
 - b. Kerjasama
4. Controlling (pengawasan) dapat dikaji dengan indikator :
 - a. Mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan
 - b. Memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi
 - c. Menyelesaikan masalah yang dihadapi dan mengusulkan solusi alternatif yang tepat.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Manajemen Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2009:553), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dan tempat untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan penulis yang ingin mengeksplorasi manajemen dana desa untuk kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Desa Sidorejo sebagai instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam manajemen dana desa.

C. Teknik Penentuan Informan

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012:15). Adapun kriteria yang ditetapkan untuk sample dalam penelitian manajemen dana desa untuk

kesejahteraan masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri adalah Sekretaris Desa Sidorejo, anggota BPD (Badan Pengawas Desa), dan tokoh masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan dipakai adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Mathew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johny Saldana (2014:12) yang menggunakan 3 komponen analisisnya yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Sidorejo selalu berupaya melakukan manajemen dana desa dengan semaksimal mungkin sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Manajemen yang dilakukan Pemerintah Desa Sidorejo dapat kita lihat melalui 4 indikator manajemen menurut George R. Terry (1975:26), yaitu :

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah fungsi untuk merencanakan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan untuk mencapainya. Perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan karena dapat membantu menjalankan tugas secara sistematis dalam mencapai target yang diinginkan.

Hasil penelitian *planning* (perencanaan) manajemen dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sidorejo sudah baik. Hal ini dilihat dari indikator penentuan dan penetapan tujuan yang jelas. Dalam indikator tersebut menunjukkan bahwa dalam manajemen dana desa, Desa Sidorejo bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam melakukan dan menentukan program

kesejahteraan masyarakat berdasarkan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Musyawarah merupakan hal yang diutamakan pemerintah untuk membahas manajemen dana desa. Musyawarah dilakukan dengan cara bertahap yaitu musyawarah dusun yang bertujuan untuk menggali apa saja yang menjadi prioritas atau yang dibutuhkan masyarakat, musyawarah desa didalamnya membahas hasil dari musyawarah dusun untuk dikaji ulang dan dijadikan rancangan untuk keperluan musrenbangdes. dan untuk musrenbangdes sendiri digunakan untuk menetapkan RKP Desa dan RAPB Desa. Indikator analisa kemampuan sumber daya yang dimiliki desa Sidorejo meliputi sumber daya alam, kas desa, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menggali sumber daya yang ada melalui musyawarah dengan masyarakat dan melakukan pengamatan. Indikator penetapan keberhasilan yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan melihat hasil dari kegiatan yang tepat waktu, efisien dan terpenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator mengenai adanya batasan waktu yang jelas menunjukkan proses manajemen dana desa mulai dari musyawarah dusun yang

dilakukan di bulan Januari, musyawarah desa di bulan Februari, dan musrenbangdes di bulan Maret.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah fungsi untuk mengelompokkan pekerjaan agar mudah diselesaikan. Pengorganisasian sangat penting mengingat bahwa dalam melaksanakan tugas setiap aparatur mempunyai fungsi yang berbeda dan bekerja sesuai bidangnya masing-masing.

Hasil penelitian dari *organizing* (pengorganisasian) manajemen dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sidorejo cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator pengalokasian sumber daya yang ada menunjukkan pemerintah desa mengerahkan sumber daya manusia yang ada di Desa Sidorejo. Pemerintah melibatkan masyarakat, perangkat desa, BPD, TPK, RT maupun RW. Namun disisi lain masyarakat tidak selalu dilibatkan dalam hal penganggaran keuangan. Hal ini jelas dari pemerintah sendiri yang menentukan besaran dana yang akan dikeluarkan untuk program kesejahteraan masyarakat. Indikator perumusan dan penetapan tugas yang dilakukan pemerintah desa dengan menyesuaikan kemampuan dari masing-masing

pihak yang akan diberi tugas dan harus sesuai dengan bidang atau keahliannya. Indikator pembagian tugas yang dilakukan pemerintah desa dengan membaginya secara jelas dan gamblang. Pemerintah tidak akan memberikan tugas kepada pihak yang bukan ahli dalam bidangnya, sehingga pihak yang diberi tugas mengerti dan paham mengenai tugasnya.

c. *Actuating* (penggerakan)

Penggerakan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci dan matang. Hasil penelitian dalam hal *actuating* (penggerakan), manajemen dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sidorejo cukup baik. Hal ini dilihat dari pemerintah desa yang selalu memberikan arahan kepada semua pihak untuk melakukan kerja cerdas dan kerjasama. Pemerintah juga membuat tim khusus yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Selama ini pemerintah telah melaksanakan program kesejahteraan masyarakat seperti melakukan pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana, mengatasi kemiskinan dan sistim informasi desa. Namun sebenarnya manajemen dana desa tidak hanya diperuntukkan untuk

pembangunan infrastruktur saja. Kemajuan ekonomi dan pemberdayaan masyarakatlah yang seharusnya di perhatikan oleh pemerintah. Ekonomi yang semakin meningkat akan membuat masyarakat menjadi sejahtera.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil penelitian dalam hal *controlling* (pengawasan), manajemen dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sidorejo cukup baik Hal ini dapat dilihat dari indikator evaluasi keberhasilan atau kegagalan yang dilakukan pemerintah dengan mengajak semua pihak yang terlibat untuk mengevaluasi jalannya kegiatan. Evaluasi ini sangat perlu dilakukan supaya kegiatan yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi. Indikator mengenai koreksi penyimpangan yang terjadi pemerintah selalu melakukan pengawasan secara intensif, masyarakat juga di libatkan untuk melakukan pengawasan kepada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan.

Adanya pengawasan dari semua pihak dimaksudkan supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan bisa dilakukan. Indikator mengenai pemecahan masalah yang dilakukan pemerintah desa dengan membantu memberikan solusi yang paling tepat untuk dilakukan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Manajemen Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri dilaksanakan dengan baik. Adanya tujuan, waktu, dan pembagian tugas yang jelas menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan proses manajemen dengan baik. Masyarakat selalu dilibatkan dalam proses manajemen dana desa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum maksimal karena pemerintah desa selalu menggunakan dana desa untuk pembangunan fisik dan tidak terbuka dalam penganggaran keuangan. Berikut ini hasil dapat disimpulkan melalui 4 indikator yaitu :

1. *Planning* (perencanaan) sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa yang telah melaksanakan penetapan tujuan

- yang cukup jelas dengan melihat kemampuan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Pemerintah desa mempunyai standar keberhasilan yang ditetapkan serta adanya jadwal waktu kegiatan dari awal sampai akhir.
2. *Organizing* (pengorganisasian) sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemerintah desa yang melibatkan semua sumber daya manusia yang dimiliki, merumuskan dan menetapkan tugas dengan teliti serta membagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun disisi lain masyarakat tidak selalu dilibatkan dalam hal penganggaran keuangan.
 3. *Actuating* (penggerakan) sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan upaya pemerintah desa untuk selalu memberikan arahan dan motivasi kepada berbagai pihak untuk melakukan kerja cerdas dan kerjasama. Pemerintah desa telah melakukan pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana, mengatasi kemiskinan dan sistim informasi desa. Namun sebenarnya pengelolaan dana desa tidak hanya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur saja. Kemajuan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya di perhatikan oleh pemerintah.
 4. *Controlling* (pengawasan) di Desa Sidorejo sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemerintah desa yang melakukan evaluasi dengan melibatkan semua pihak dan membantu memberikan solusi pada masalah yang terjadi. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap segala penyimpangan yang terjadi.

SARAN

1. Berdasarkan fungsi pengorganisasian dalam indikator merumuskan dan menetapkan tugas, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam hal penganggaran keuangan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dengan cara mengikutsertakan Kadus kemudian Kadus menyampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah dusun.
2. Berdasarkan fungsi penggerakan dalam indikator kerjasama, pemerintah desa dalam melaksanakan program kesejahteraan masyarakat juga harus meningkatkan kemajuan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya terfokus pada infrastruktur saja. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara

memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat karena dengan pemberdayaan yang baik akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v2i1i.38075>
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(3), 41–57.
- Jayanti, N. A. D., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 550–560.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2016). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597–602.
- Lamber, A., Lesawengen, L., & Kawung, E. (2022). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 2(3), 1–9.
- Letik, A. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), 31–52.
- Luju, E., Wisang, I. V., Wulandari, C. A., & Poin, E. A. (2020). PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA BLORO KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA. *Jurnal Projemen*, 7(1), 37–55.
<http://projemen.nusanipa.ac.id/index.php/projemen/article/view/6%0Ahttp://projemen.nusanipa>

ac.id/index.php/projemen/article/view/6/5

- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202–224.
- Rahmawati, A., Hendrarto, & Ahsani, R. D. P. (2019). Manajemen Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang Tahun 2018. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 149–156.
<https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.3303>
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 5(1), 77–90.
<https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1498>
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348–354.
<https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117>
- Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39–43.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>

BUKU

Karyanto. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen (Teori, Definisi, dan Konsep)*.

Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). Dasar Dasar Manajemen (Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efesien). In *Perdana*.
<http://repository.uinsu.ac.id/2836/>

George R. Terry dalam buku Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). Dasar Dasar Manajemen (Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efesien). Halaman 26

SUMBER LAIN

Undang-Undang No 6 Tahun 2014
tentang Dana Desa
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa